



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI SELASA, 16 APRIL 2013



DAFTAR ISI

KEK	1
Jembatan Selat Sunda	2
Proyek MRT	3 - 4
Regasifikasi	5
CPO	6



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Kawasan Marunda Butuh Waktu Lama Menjadi Kota Baru	<div>- Dalam perencanaan tata ruang, sebetulnya Marunda telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sejak dua tahun lalu</div> <div>- Dampak lanjutan dari terbentuknya kawasan perekonomian baru, kemacetan di pusat bisnis Ibu Kota setidaknya dapat sedikit terurai</div> <div>- Rencana detail mengenai kawasan tersebut masih harus menunggu pembentukan rencana detail kawasan strategis</div>					

KAWASAN MARUNDA

Butuh Waktu Lama Menjadi Kota Baru

Fatma Qanitat
redaksi@bisnis.co.id

Marunda, kawasan yang terletak di perbatasan Jakarta Utara dan Bekasi ini disebut-sebut akan disulap menjadi 'kota baru' oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berada di sisi paling ujung dan berbatasan langsung dengan garis pantai utara Pulau Jawa, membuat kawasan ini kurang populer. Sebut saja ribuan unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Marunda mangkrak lebih dari 5 tahun.

Karena sulitnya akses, membuat masyarakat merasa enggan untuk bertempat tinggal di sana.

Dalam perencanaan tata ruang, sebetulnya Marunda telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) sejak 2 tahun lalu. Melalui surat keputusan tersebut, luasan sekitar 3.200 ha akan dikembangkan sebagai KEK Marunda.

Rencana tersebut mengemuka setelah Pelabuhan Tanjung Priok mulai mengalami kejenuhan, sehingga dibutuhkan pelabuhan baru untuk menopang fungsi tersebut.

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Gamal Sinurat menuturkan setelah pemda diberikan wewenang untuk membangun pelabuhan sendiri, munculah rencana membangun KEK Marunda dengan fungsi utama sebagai pelabuhan, yang terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

"Beban yang ditanggung oleh Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah terlalu tinggi, memunculkan kebutuhan akan pelabuhan baru," tuturnya pekan lalu.

Di luar fungsi sebagai pelabuhan, tuturnya, Marunda juga berfungsi untuk menampung kegiatan industri, perdagangan, dan fungsi penunjang lainnya ter-

Profil Pengembangan KEK Marunda

Total Luas: 3.200 ha
Pengembangan Tahap Awal: 202 ha
Waktu pengembangan: 3 tahun

Pemanfaatan Lahan:

1. Kawasan industri dan pergudangan

2. Perkantoran, perdagangan, dan jasa

3. Perumahan vertikal

4. Pelayanan umum dan sosial

5. Taman kota

6. Hutan kota



Sumber: Dari berbagai sumber diolah

Bisnis/Iham Nesabana

masuk perumahan dan transportasi.

Dengan pengembangan seluruh fungsi tersebut, Pemprov DKI mengharapkan Marunda dapat disulap menjadi 'kota baru'. Dampak lanjutan dengan terbentuknya kawasan perekonomian baru, kemacetan di pusat bisnis Ibu Kota setidaknya dapat sedikit terurai.

WAKTU PANJANG

Namun, rencana pengembangan tersebut sepertinya masih membutuhkan waktu panjang. Gamal mengatakan setidaknya masih dibutuhkan waktu 10 tahun sampai rencana itu bisa terealisasi.

Rencana detail mengenai kawasan tersebut, jelasnya, masih harus menunggu pembentukan rencana detail kawasan strategis. Sementara untuk menyusun rencana tersebut, masih harus menunggu terbentuknya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Raperda RDTR yang selayaknya rampung pada akhir 2012 tersebut, sengaja diundur oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menyaring pendapat masyarakat sekaligus memasukkan berbagai rencana strategis, dalam desain tata ruang DKI untuk 5 tahun ke depan.

"Konsep substansi Raperda RDTR sudah sampai 90%. Melalui pematangan dengan instansi terkait, kami berharap sudah bisa diajukan kepada Gubernur dalam bulan ini," tuturnya.

Tak berhenti di sana, draf yang sudah mendapat persetujuan dari Jokowi tersebut, harus dibawa ke rapat paripurna untuk dibahas dan disahkan anggota dewan.

Meskipun begitu, ujar Gamal, rencana untuk menyulap Marunda sebagai 'kota baru' tidak perlu menunggu sampai raperda rampung.

Pengembangan infrastruktur dengan menambah jaringan

jalan sudah dimulai sejak rencana tersebut mengemuka.

Selain itu, Pemprov DKI juga tengah gencar menambah pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di kawasan sekitar, khususnya rusun bagi pekerja di kawasan industri.

Di Marunda, Pemprov DKI berencana menambah 10 blok rusunawa, karena masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan dengan luas sekitar 11 ha. Dengan pembangunan tersebut, total blok di kawasan tersebut akan berjumlah 36 blok.

Kepala Seksi Perencanaan Makro Ruang Kota Bidang Perencanaan Ruang Kota Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Zulkifli Zanti Arbi mengatakan jika perencanaan pengembangan sudah disetujui oleh Gubernur, proses pengembangan tahap pertama ditargetkan rampung dalam waktu 3 tahun.

Untuk diketahui, dari total rencana pengembangan 3.200

ha tersebut, hampir separuhnya akan memanfaatkan wilayah air di pesisir utara Jakarta. Prosesnya pengembangannya akan dilakukan dalam beberapa tahapan.

Dalam rencana, kawasan di sisi timur laut Marunda dengan luasan 202 ha akan dikembangkan lebih awal. Zulkifli menuturkan lebih dari 50% kawasan tersebut akan dimanfaatkan sebagai kawasan industri dan pergudangan.

Sisanya antara lain akan dikembangkan untuk perkantoran, perdagangan, dan jasa. Kemudian untuk perumahan vertikal, pelayanan umum dan sosial, taman kota, serta hutan kota.

"SK penetapan KEK Marunda itu sudah ditandatangani sejak 2011. Bagaimana kelanjutannya, masih menunggu kebijakan dari gubernur saat ini," ujarnya.

Struktur ruang KEK Marunda ini, tambahnya, sudah disusun. Struktur tersebut mungkin berubah mengikuti rencana bisnis yang saat ini masih disusun.

"Jika ada hitungan ekonomi yang berubah, strukturnya mungkin saja berubah. Apa saja bisnis yang mau dikembangkan, jenis industrinya apa saja, berapa besar investasinya. Itu yang tengah disusun oleh Badan Usaha KEK Marunda," papar Zulkifli.

Direktur Indonesia Property Watch Ali Trangganda menilai sebagai suatu kawasan, Marunda masih dikenal sebagai kawasan kumuh. Rencana untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai 'kota baru', tuturnya, harus didukung dengan kebijakan dari pemda.

"Dari desain tata ruang saat ini masih belum terlalu mendukung. Kalau pemda mau membangun, harus didukung dengan perencanaan tata ruangnya. Selama tidak jelas, jadinya juga tidak akan jelas," tandas Ali.



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Jembatan Selat Sunda Menteri PU Usulkan Sejumlah BUMN	<div><div>Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto menyampaikan saat ini alternatif lain untuk pembangunan JSS sudah ada dan dirinya sendiri memiliki opsi pembangunan JSS tersebut yakni dengan membentuk konsorsium BUMN</div><div>BUMN mampu menjadi investor untuk proyek yang akan membangun konektivitas perekonomian Jawa dengan Lampung tersebut mengingat banyaknya manfaat dari proyek tersebut</div></div>					

JEMBATAN SELAT SUNDA

Menteri PU Usulkan Sejumlah BUMN

JAKARTA—Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan telah memilih dan mengusulkan sejumlah BUMN kepada Menko Perekonomian untuk berkonsorsium dalam menggarap pembangunan Jembatan Selat Sunda.

Djoko menyampaikan saat ini alternatif lain untuk pembangunan JSS sudah ada dan dirinya sendiri memiliki opsi pembangunan JSS tersebut yakni dengan membentuk konsorsium BUMN.

“Kemarin *kun* memang ramalnya begitu, sekarang sudah ada alternatifnya. Saya pun sudah *milih* [BUMN], tapi siapa yang saya pilih itu biar Menko [Perekonomian] yang bicara,” ujarnya Jumat (12/4).

Menurutnya, BUMN mampu menjadi investor untuk proyek yang akan membangun konektivitas perekonomian Jawa dengan Lampung tersebut mengingat banyaknya manfaat dari proyek tersebut.

“Tidak hanya jembatan untuk transportasi kendaraan, tapi bisa juga untuk pipa bawah laut dan sebagainya, sehingga mereka bisa berinvestasi di sana.”

Seperti yang diketahui, sebelumnya PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) yang merupakan gabungan dari PT Grup Artha Graha, Pemprov Banten, serta Pemprov Lampung siap menjadi investor jembatan sepanjang 30 km tersebut. Akan tetapi, karena tidak adanya kelanjutan, GBLS menyerahkan sepenuhnya kelanjutan proyek tersebut kepada pemerintah.

Polemik proyek ini muncul ketika Peraturan Presiden No. 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) dinilai harus direvisi dan mengatur penjaminan pemerintah. Sementara peraturan itu menyebutkan pembangunan murni dilakukan swasta tanpa sokongan APBN.

Djoko pernah menegaskan masuknya BUMN dalam konsorsium pemrakarsa JSS akan mengambil porsi saham PT Bang ungraha Sejahtera Mulia, 90% saham GBLS. Adapun BUMD Provinsi Banten dan Lampung masing-masing menguasai 5%. (*Bisnis*, 12 Nov. 2011) (*Dimas Novita S.*)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Proyek MRT Persoalan Administrasi Terselesaikan	<div>- Mendagri Gamawan Fauzi, paparnya, sudah memberpersetujuan kepada Pemprov DKI untuk melanjutkan pembangunan MRT Jakarta</div> <div>- Surat revisi persetujuan terkait administrasi segera dikeluarkan Mendagri sehingga percepatan proses pembangunan MRT dapat segera dilakukan</div> <div>- Tahapan proyek MRT kini tinggal menunggu pengumuman pemenang lelang fisik terhadap enam paket sipil yang telah ditenderkan pada 2012</div>					Tahap menunggu pengumuman pemenang lelang

► PROYEK MRT

Persoalan Administrasi Terselesaikan

Emanuel T. Hayen & Akhirul Anwar
redaksi@bisnis.co.id

JAKARTA—Pelaksanaan proyek *mass rapid transit* (MRT) memperoleh titik terang menyusul persetujuan Menteri Dalam Negeri kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan pembangunan angkutan massal berbasis rel tersebut.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kendala administrasi yang sebelumnya menghadang telah diselesaikan oleh Pemprov DKI dan Mendagri.

Mendagri Gamawan Fauzi, paparnya, sudah memberikan persetujuan kepada Pemprov DKI untuk

melanjutkan pembangunan MRT Jakarta.

Ahok, sapaan akrab Basuki, menjelaskan surat revisi persetujuan terkait administrasi segera dikeluarkan Mendagri sehingga percepatan proses pembangunan MRT dapat segera dilakukan.

Sementara itu, terkait dengan surat revisi persetujuan dari DPRD DKI, dia mengungkapkan DPRD justru menyarankan memakai surat persetujuan yang lama karena pada dasarnya DPRD sudah menyetujui pembangunan MRT, meski terjadi pergantian kepala daerah.

"Dari hasil rapat beberapa hari lalu, pokoknya sudah oke semua-

nya. Mendagri sudah oke. DPRD DKI juga. Malah bisa pakai surat persetujuan yang lama," kata Ahok di Balai Kota, Senin (15/4).

Dengan mengantongi persetujuan dari Mendagri dan DPRD DKI, tahapan proyek MRT kini tinggal menunggu pengumuman pemenang lelang fisik terhadap enam paket sipil yang telah ditenderkan pada 2012.

Terkait dengan pencairan dana, mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan jika sudah ada rekomendasi dari Kemendagri dan DPRD DKI, otomatis dana tersebut langsung cair untuk pelaksanaannya. "Di Bappenas sudah ada dananya. Makanya tinggal cair," ujar

Ahok.

Dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pinjaman Daerah Nomor 30/2011 dijelaskan bahwa Bappenas tidak dapat mencairkan dana jika Mendagri maupun DPRD belum membuat revisi persetujuan pinjaman.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengungkapkan jajaran direksi MRT terus berjuang untuk menyelesaikan persoalan yang terkendala dan tetap menargetkan pada akhir April pengumuman tender tetap berjalan dan *ground breaking* bisa dilaksanakan.

Terkait dengan pemenang tender, dia menjelaskan sudah ada nama

perusahaan yang menang. Menurutnya, pemenang tender tersebut akan melakukan pengerjaan tiga paket. Untuk tahap pertama akan menelan biaya sebesar 125 miliar yen.

Dalam proyek MRT Jakarta ada delapan paket tender konstruksi baik prasarana maupun sarana. Tender tersebut terdiri dari tiga paket konstruksi sipil untuk *underground* (bawah tanah), tiga paket konstruksi sipil untuk *elevated* (*laying*), satu paket untuk *system and trackworks*, dan satu paket untuk *rolling stocks* (terkait keretanya).

Selain itu, masih ada paket-paket pekerjaan konsultansi yang diperlukan untuk MRT Jakarta. ▢



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pembangunan MRT Tetap Dilanjutkan	<div>- Persoalan administrasi yang sempat menggantal kelanjutan proyek itu sudah di bereskan</div> <div>- Revisi diperlukan karena ada perubahan dalam skema pembagian beban pengembalian pinjaman antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat</div>					

TRANSPORTASI

Pembangunan MRT Tetap Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sinyal positif atas kelanjutan proyek transportasi cepat massal. Persoalan administrasi yang sempat menggantal kelanjutan proyek itu sudah di bereskan.

"Sebenarnya ada salah paham saja. Kementerian Dalam Negeri mengira harus diganti (surat persetujuannya). Tetapi, Mendagri sekarang sudah menyiapkan draf surat tersebut. Mungkin lusa sudah jadi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (15/4), di Balaikota.

Sebelumnya Basuki mengatakan, masih ada persoalan administrasi yang belum beres, yaitu revisi surat persetujuan dari Kemendagri untuk mengajukan persetujuan pinjaman dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemendagri menyatakan masih menunggu revisi surat

persetujuan dari DPRD DKI.

Revisi diperlukan karena ada perubahan dalam skema pembagian beban pengembalian pinjaman antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Semula pembagian pengembalian pinjaman dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) terbagi 58 persen DKI dan 42 persen pusat. Setelah negosiasi ulang, skema berubah menjadi 51 persen DKI dan 49 persen pusat.

Terkait surat dari DPRD, Basuki mengatakan, bisa dipakai surat rekomendasi lama yang dikeluarkan tahun 2007 untuk mempercepat prosesnya. "DPRD menyatakan bisa memakai surat persetujuan yang lama. Dalam surat itu tidak disebutkan adanya besaran pembagian beban sehingga tidak ada yang perlu diubah karena pada dasarnya DPRD sudah setuju dengan pembangunan MRT," ujarnya.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami bertekad menyelesaikan persoalan administrasi, menetapkan pemenang, dan memulai konstruksi secepatnya. "Kami baru tiga minggu terpilih, jadi wajar kalau kami belum banyak bicara. Kami menghabiskan waktu mempelajari dokumen, langkah-langkah inisiatif, agar kalau proyek sudah berjalan tidak berhenti di tengah jalan," katanya.

Dono mengatakan, tidak ingin terus-menerus didesak dengan berbagai pertanyaan tentang kapan MRT mulai dibangun. PT MRT Jakarta, lanjut Dono, memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. "Pada Juni 2013 ini, usia PT MRT Jakarta sudah lima tahun. Tetapi, proyek belum mulai juga. Kami baru tiga minggu berkantor secara resmi dan harus menebus ketinggalan selama lima tahun," ujar Dono.

Terkait pengumuman pemenang tender yang dikatakan Pemprov DKI pada April, Dono mengatakan, belum bisa menjanjikan pada bulan ini.

Sementara itu, sekitar 200 warga Lebak Bulus, Jalan RS Fatmawati, hingga Sisingamangaraja menggelar unjuk rasa menentang pembangunan transportasi cepat massal (MRT) layang. Warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli MRT itu mendesak Pemprov DKI membangun MRT di bawah tanah.

"Kami tidak menolak MRT. Kami mendukung asal MRT dibangun di bawah tanah, bukan layang," kata Lieus Sungkharisma, salah satu warga. Alasan warga menolak MRT layang, di antaranya, karena kekhawatiran wilayah itu menjadi kumuh. Saat pembangunan konstruksi dikhawatirkan membuat kemacetan, berisik, dan polusi udara. (FRO/RAY)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Proyek Regasifikasi Dijelaskan di Houston	<div>- Optimalisasi fasilitas gas ini termasuk dalam penyediaan fasilitas LNG Skala Kecil terutama di Indonesia timur guna memasok kebutuhan pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Negara</div> <div>- Pertamina sudah menetapkan kebijakan investasi final atas proyek terminal regasifikasi dan hub LNG Arun</div> <div>- PT. Rekayasa Industri sudah ditetapkan sebagai kontraktor dari proyek senilai Rp. 750 miliar itu</div>	2013	2015	Rp. 750 miliar	PT. Pertamina	Tahap rekayasa, pengadaan dan kontruksi

Proyek Regasifikasi Dijelaskan di Houston

HOUSTON, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) berbagi pengalaman bagaimana mengoptimalkan fasilitas gas alam cair dalam pendistribusian gas (regasifikasi) ke konsumen seperti PT Perusahaan Listrik Negara dan berbagai industri. Optimalisasi fasilitas gas ini termasuk dalam penyediaan fasilitas LNG Skala Kecil terutama di Indonesia timur guna memasok kebutuhan pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Negara.

Wakil Presiden Teknologi Direktorat Gas PT Pertamina Daniel Purba kepada wartawan *Kompas*, **Pieter P Gero**, mengemukakan, Pertamina akan berbagi pengalaman berkaitan dengan reposisi Kilang LNG Arun di Aceh yang dibangun sejak tahun 1974 menjadi terminal regasifikasi dan *hub* (penghubung) LNG untuk selanjutnya diteruskan ke industri atau pemakai seperti PLN. Hal itu dikatakan Daniel menjelang Konferensi dan Ekshibisi Internasional soal Gas Alam Cair Ke-17 yang dijadwalkan pada 16-17 April di Houston, Texas, Amerika Serikat, Senin petang atau Selasa (16/4) malam WIB.

"Pertamina sudah menetapkan kebijakan investasi final atas proyek terminal regasifikasi dan hub LNG Arun dan kini mulai dengan tahapan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi, guna mempercepat penyediaan infrastruktur penerimaan LNG di Tanah Air," ujar Daniel.

PT Rekayasa Industri sudah ditetapkan sebagai kontraktor dari proyek senilai 80 juta dollar AS atau sekitar Rp 750 miliar itu. Kegiatan proyek ini dimulai sejak Maret 2013 dan akan selesai da-

lam waktu 19 bulan.

Menurut Daniel, proyek terminal regasifikasi dan titik kumpul LNG Arun sangat mendesak mengingat kilang LNG Arun akan berhenti operasi 2014 karena pasokan gas menipis serta berakhirnya kontrak penjualan LNG Arun 2014. Padahal, terdapat sejumlah aset PT Arun NGL yang bisa dioptimalkan fungsi, yakni menjadi terminal regasifikasi dan titik kumpul LNG bagi keperluan industri dan PLN.



PT Rekayasa Industri sudah ditetapkan sebagai kontraktor dari proyek senilai 80 juta dollar AS atau sekitar Rp 750 miliar itu.

Aset yang dikelola sejak 1974 itu, ujar Daniel, terdiri dari 6 train kilang LNG berkapasitas 12,5 juta ton per tahun yang dilengkapi dengan 5 unit tangki LNG berkapasitas 636.000 m³, fasilitas ekstraksi LPG berkapasitas 1,4 MTPA dengan 4 unit tangki LPG berkapasitas 302.000 m³, dan fasilitas lainnya yang masih dapat dioptimalkan.

Manajer Umum Pengembangan Bisnis PT Pertamina M Taufik Afianto dalam konferensi dan ekshibisi tersebut juga akan menjelaskan pengalaman Pertamina dalam membangun terminal LNG Skala Kecil.



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Memperjuangkan CPO di APEC	<div>- Memasukan CPO ke daftar produk ramah lingkungan (environmental goods list atau Egs list) sangat penting untuk memotovasi negara berkembang memproduksi green product</div> <div>- Perlu adanya kontribusi dari negara berkembang yang umumnya mengandalkan sektor pertanian dan kehutanan agar bisa masuk daftar produk ramah lingkungan</div>					

Memperjuangkan CPO di APEC

■ Oleh Dwi Murdaningsih

Pemerintah tak akan berhenti memperjuangkan *crude palm oil* (CPO) sebagai produk ramah lingkungan dalam forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC). Direktur Jenderal Kerja Sama Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, memasukkan CPO ke daftar produk ramah lingkungan (*environmental goods list* atau *Egs list*) sangat penting untuk memotivasi negara berkembang memproduksi *green product*.

Tahun lalu, dalam sidang APEC di Vladivostok, Rusia, 99 persen produk ramah lingkungan yang disepakati di APEC umumnya berupa produk manufaktur. Dengan begitu, kesempatan negara berkembang untuk bisa memasukkan daftar produk ramah lingkungan menjadi berkurang.

Tahun lalu juga dimasukkan 54 pos tarif yang dianggap sebagai EG, seperti turbin. Produk-produk manufaktur banyak dihasilkan oleh negara yang sudah menguasai teknologi.

Karena itu, kata Iman, perlu adanya kontribusi dari negara berkembang yang umumnya

mengandalkan sektor pertanian dan kehutanan agar bisa masuk daftar produk ramah lingkungan. Dengan alasan itu pulalah, Indonesia akan mengajukan minyak sawit atau CPO ke *Egs list*. Rendemen CPO dinilai lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya.

Berdasarkan hitung-hitungan produksi, Iman melanjutkan, produktivitas dalam satu hektare sawit lebih tinggi dibandingkan lainnya. Dengan alasan yang sama, Indonesia juga akan mengajukan karet sebagai produk ramah lingkungan.

Produk-produk yang masuk kategori ramah lingkungan akan mendapatkan keringanan tarif maksimal lima persen pada 2015. "Selain itu, kita punya kepentingan agar daftar ini lebih *balance* (antara negara maju dan berkembang)," ujar Iman, pekan lalu.

Menurut dia, jika CPO dan karet bisa disepakati sebagai produk ramah lingkungan, akan berdampak baik, terutama bagi negara berkembang yang umumnya menjadikan CPO dan karet sebagai produk ekspor andalan. Isu mengenai perdagangan negara berkembang ini juga akan dibahas lebih detail pada sidang organisasi perdagangan dunia (WTO) Desember mendatang.

Menteri Perdagangan Gita Wir-

jawan mengakui perlu kerja keras agar CPO bisa gol ke daftar produk ramah lingkungan. Apalagi, selama ini banyak pihak yang resisten dengan CPO. Beberapa negara menganggap CPO sebagai produk yang tidak ramah lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan.

Peranan UKM

Selain membahas *Egs list*, pertemuan para menteri perdagangan anggota APEC di Surabaya, 20-21 April, juga membahas topik lainnya yang menjadi menu pembahasan pertemuan tersebut. Antara lain, mengenai peranan UKM, produk ramah lingkungan, konektivitas, dan persiapan menuju sidang organisasi perdagangan dunia (WTO).

Iman mengatakan, perekonomian kawasan akan digiring menuju arah memperkecil jurang antara sesama pelaku usaha. Partisipasi UKM atau pebisnis pemula akan ditingkatkan di era globalisasi.

"Integrasi perekonomian dengan kawasan dan dunia harus diimbangi keseriusan memastikan bahwa proses integrasi bukannya memperlebar, tetapi harus memperkecil jurang perbedaan. Antara lain, dengan meningkatnya partisipasi UKM," ujar Iman.

Meskipun keanggotaan APEC bersifat sukarela, menurut dia, pembahasan itu penting lantaran situasi perekonomian dunia saat ini masih tidak pasti. ■ **ed:** eh ismail

139,90
Miliar
Dolar AS

Total ekspor Indonesia ke negara anggota APEC tahun 2012.